

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2001.
- Cahyani, T. D., & Al-Fatih, S. (2020). Peran Muhammadiyah Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Kota u. *Justitia Jurnal Hukum*, 4(2).
- Hartono, B., Hasan, Z., & Khurniawan, H. B. (2022). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitasi Gedung Smpn 10 Metro Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor: 32/Pid. Sus-Tpk/2021/Pn. Tjk). *Sol Justicia*, 5(2), 192-204.
- Harefa, N. S. K., Manik, G. K., Marpaung, I. K. Y., & Batubara, S. A. (2020). Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (Pns): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid. Sus-Tpk/2018/Pn. Mdn. *Sign Jurnal Hukum*.
- Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan pembuktian terbaik dalam delik korupsi (UU No. 20 tahun 2001)*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Mukaromah, Dwi Asri. (2013). *Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi ditinjau Dari Ajaran Sosialis Oleh Karl Mark (Ihp)*, 2.
- Nafis, S. (2020). Pencegahan Dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Yang Kemudian Dirubah Oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Undang Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Nomor Perkara 67/Pid. Sus-Tpk/2018/Pn Bdg). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara (Mjn)*, 10(1), 39-64.

- Evi Hartanti, S. H. (2023). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.
- Harefa, N. S. K., Manik, G. K., Marpaung, I. K. Y., & Batubara, S. A. (2020). Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (Pns): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid. Sus-Tpk/2018/Pn. Mdn. *Sign Jurnal Hukum*, 2(1), 30-42.
- Hartono, B., Hasan, Z., & Khurniawan, H. B. (2022). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitasi Gedung Smpn 10 Metro Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor: 32/Pid. Sus-Tpk/2021/Pn. Tjk). *Sol Justicia*, 5(2), 192-204.
- Karnudin, K. (2020). Perlindungan Anak Sebagai Fungsi Negara Hukum Kesejahteraan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No. 177/Pid. Sus/Tpk/2015/Pn. Bdg Dan Putusan No. 179/Pid. Sus/Tpk/2015/Pn. Bdg. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara (Mjn)*, 10(1), 65-92.
- Kurniawan, R. C. (2021). *Pengaturan Kewenangan Kpk Dan Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Deepublish.
- Maradona, T. (2022). *Optimalisasi Peran Penyidik Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengembalian Kerugian Negara (Studi Di Kepolisian Daerah Lampung)* (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung).
- Mirmaska, A. A. (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Bebas Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Jalan (Studi Putusan Nomor 3/Pid. Sus-Tpk/2022/Pn. Tjk). *Jurnal Hukum Respublica*, 22(2).
- Maradona, T. (2022). *Optimalisasi Peran Penyidik Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengembalian Kerugian Negara (Studi Di Kepolisian Daerah Lampung)* (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung).
- Nafis, S. (2020). Pencegahan Dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undangundang No. 31 Tahun 1999 Yang Kemudian Dirubah Oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Undang Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Nomor Perkara 67/Pid. Sus-

- Tpk/2018/Pn Bdg). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara (Mjn)*, 10(1), 39-64.
- Riani, R. S., & Jumadi, J. (2023). Pengaturan Illicit Enrichment Di Indonesia: Studi Perbandingan Negara Peru. *Ex Aequo Et Bono Journal Of Law*.
- Silfia, D. (2023). Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Sebagai Alasan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (Asn) Tidak Dengan Hormat (Studi Putusan Mk Nomor 87/Puu-Xvi/2018) (Doctoral Dissertation, Uin Prof. Kh Saifuddin Zuhri).
- Sumarto Hetifa Sj,n 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Sutedi. 2011. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Jakarta. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Pahlevi, F. S. (2022). Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Al-Syakhsiyyah: Journal Of Law & Family Studies*, 4(1), 44.
- Permadi Setyonagoro, S. H. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Di Provinsi Jawa Timur*. Scopindo Media Pustaka.
- Rangian, A. (2020). Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Pungutan Liar Sebagai Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 9(3).
- Riani, R. S., & Jumadi, J. (2023). Pengaturan Illicit Enrichment Di Indonesia: Studi Perbandingan Negara Peru. *Ex Aequo Et Bono Journal Of Law*, 1(1).
- Roni Efendi, M. H. (2021). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tradisi Omerta Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Deepublish.
- Siburian, R. J., & Wijaya, D. (2022). Korupsi Dan Birokrasi: Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 1-16.
- Simanjuntak, I. S. (2019). Kedudukan Oerasi Tangkap Tangan (Ott) Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Ilmu Hukum Prima (Ihp)*, 2(2), 33-51.
- Simbolon, N. Y. (2020). Politik Hukum Penanganan Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 157-177.

- Suastiningsih, N. K. (2022). *Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Di Desa Adat Ungasan* (Doctoral Dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).
- Trenggono, M. I. (2022). Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Pengangkatan Menjadi Pns Oleh Oknum Aparatur Sipil Negara (Asn).
- Tryadi, M. H. (2020). Pertanggungjawaban Pidana R Dan H Melakukan Perusakan Alat Bukti Dengan Tujuan Mencegah Penyidikan Dan Penyidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 18(1), 183-198
- Wicaksono, B. (2023). Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Polres Dompu. *Sivis Pacem*, 1(2), 163-194.
- Wiranti, Y., & Arifin, R. (2020). Tantangan Dan Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 20(1), 45-55